

Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016

I Made Redi Hartana*

Abstraksi :

“Konflik antar agama di tanjung balai Sumatera Utara tahun 2016 adalah sebuah representasi toleransi beragama yang mengalami deskalasi. Aksi kekerasan dan agitasi pun mewarnai konflik tersebut yang menjadi simbol kekecewaan dan kebencian terhadap kelompok rivalnya. Tak heran jika hasil akhir konflik mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang justru memperburuk sebuah kehidupan sosial. Kejadian ini tentunya perlu dianalisa secara komprehensif agar Polri (baca : Polres Tanjung Balai) sebagai pemegang otoritas keamanan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya untuk mengintervensi konflik antar agama di tanjung balai sehingga dapat dicegah dan ditangani dengan baik.”

Kata Kunci : Teori Smelser, Konflik Antar agama dan pemolisian.

PENDAHULUAN

Keragaman suku, agama, ras dan budaya adalah sebuah keniscayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga menjadi simbol bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang unggul dibandingkan dengan negara-negara lain. Keragaman inilah yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, namun secara realitas justru keragaman tersebut memproduksi banyaknya konflik-konflik horizontal yang dapat membiaskan secara maknawi prinsip

Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Terkait dengan hal tersebut maka konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar agama dengan menggunakan kekerasan. Menurut John T. Sidel (2007: 7) dalam bukunya berjudul *Riots, Pogroms, and Jihad: Religious Violence in Indonesia* mendefinisikan kekerasan keagamaan (*religious violence*) yaitu *“collective physical attacks on persons or property launched in avowed defense or promotion of religious beliefs, boundaries, institutions, traditions, or values, and behind religious symbols and slogans”*. Terang sudah bahwa konflik antar agama yang dilandasi dengan kekerasan seolah menumbalkan sebuah kemajemukan dan kekayaan khazanah agama di Indonesia. Tentunya dampak dari kerugian

* I Made Redi Hartana adalah mahasiswa Pascasarjana (S2) STIK-PTIK angkatan VI. Email : imez1803@gmail.com

konflik antara agama tak terbilang banyaknya baik secara kerugian materiil maupun non-materiil.

Sebenarnya, menurut Emile Durkheim (Macionis, 2006) agama memiliki 3 fungsi yaitu Fungsi yang pertama adalah sebagai perekat sosial, agama berfungsi mempersatukan orang-orang melalui simbolisme, nilai dan norma bersama. Yang kedua adalah sebagai kontrol sosial, agama berfungsi untuk mendorong terjadinya konformitas. Dan yang terakhir adalah sebagai pemberi makna dan tujuan, agama berfungsi menawarkan rasa aman dan nyaman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kesimpulannya agama pasti mengajarkan dan menghasilkan sesuatu hal yang baik, namun akan menjadi masalah ketika agama tersebut ditafsirkan salah oleh pribadi atau kelompok tertentu sehingga tak heran benih-benih kebencian antar umat beragama akan tumbuh subur menjadi konflik kekerasan yang bisa memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wahid Foundation memaparkan hasil penelitiannya mengenai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama yaitu di tahun 2015 tercatat 190 peristiwa dengan 249 tindakan kekerasan sedangkan di tahun 2016 terjadi 204 peristiwa dengan 313 kekerasan sehingga di tahun 2016 kekerasan yang mengatasnamakan agama meningkat sekitar 7 (tujuh) persen. Sedangkan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang masih belum hilang dari benak kita adalah konflik antar agama islam dan agama budha yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2016 di tanjung balai Sumatera Utara. Adapun dampak dari kerugian dari konflik tersebut adalah 10 rumah ibadah (Vihara dan klenteng), 1 yayasan sosial dan 8 unit kendaraan roda 4 yang telah rusak dan dibakar.

PERMASALAHAN

Konflik antar agama yang serupa di tanjung balai acapkali terjadi di penjuru wilayah Indonesia, sebut saja konflik ambon 1999-2000, konflik Poso 1998-2000, konflik tolikara papua 2015, dan lain-lain sehingga konflik tersebut patut dicatat sebagai konflik sosial bernuansa agama yang cukup besar sepanjang sejarah Indonesia. Namun demikian, jika dilihat maka konflik tersebut selalu didominasi perseteruan antara pemeluk agama islam dan agama Kristen, yang barang tentu beda halnya dengan kejadian di tanjung balai yang melibatkan konflik antar agama islam dan budha. Terkait konflik tanjung balai sebenarnya tidak hanya terjadi baru-baru ini, menurut Camat Tanjung balai Selatan Pahala Zulfikar mengatakan bahwa konflik tersebut pernah berlangsung pada tahun 1998. Selain itu pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 pemeluk agama islam dan budha mengalami konflik kembali, dengan penyebab bahwa ormas yang mengatasnamakan "Gerakan Islam Bersatu" mendesak pemerintah menurunkan Patung Buddha setinggi 6 meter berada di atas gedung lantai empat Vihara Tri Ratna, dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan islami di Kota Tanjungbalai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Konflik ini pun meredam dan menjadi laten ketika beredarlah isu bahwa akan didirikan sebuah masjid terapung di muara Sungai Silau yang bertemu dengan Sungai Asahan. Namun ironisnya seiring berjalannya waktu di tahun 2016 konflik antar agama islam dan budha muncul ke permukaan kembali dengan pemicu yaitu mempersoalkan pengeras suara di masjid yang akhirnya konflik berubah menjadi manifest. Konflik ini harusnya dapat diselesaikan dan dicegah dengan mencari akar permasalahan dan memberikan solusi pemolisian kepada aparat kepolisian (baca : Polres Tanjung balai) sebagai pemegang otoritas keamanan agar konflik dapat diredam. Oleh karena itu

penulis memandang bahwa konflik ditanjung balai perlu dianalisa dengan menggunakan teori perilaku kolektif menurut smelser agar terlihat pentahapan dari konflik tersebut, sekaligus dianalisa melalui perspektif konflik nilai sehingga dapat memberikan intervensi melalui solusi pemolisian kepada aparat keamanan dan instansi terkait.

ANALISA DAN PENERAPAN TEORI

Konflik keagamaan di tanjung balai menurut penulis dapat dikategorikan sebagai konflik identitas yang disebutkan oleh Max Weber bahwa konflik terjadi bukan hanya sekedar alasan ekonomi atau kepemilikan alat-alat produksi namun konflik dapat terjadi karena aspek konsumsi, life style, status, menyangkut simbol, idelogi, dan keagamaan (religiusitas). Konflik keagamaan menjadi masalah sosial tersendiri di tanjung balai karena konflik sudah terjadi berulang kali dan dapat mengganggu stabilitas keamanan bahkan hubungan masyarakat yang ada di tanjung balai, terkait hal ini maka dalam buku Drs. Soetomo yang berjudul masalah sosial dan pembangunan (1995) bahwa masalah sosial dapat dikaji dalam **perspektif konflik nilai** yaitu memandang masalah sosial dapat terjadi apabila dua kelompok atau lebih dengan nilai yang berbeda saling bertemu dan berkompetisi, jika dalam suatu masyarakat memiliki perbedaan nilai atau kepentingan maka akan memunculkan pertentangan atau polarisasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain sehingga tercetuslah konflik.

Oleh karena itu pengkajian konflik antar agama di tanjung balai Sumatera Utara berdasarkan pada perspektif konflik nilai menjelaskan masyarakat pemeluk agama islam memiliki nilai subyektif dalam menjalani kehidupan beragamanya di tanjung balai, apalagi masyarakat muslim menjadi kelompok mayoritas sejumlah 14.099 jiwa sehingga nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat mendominasi

di wilayah tanjung balai dibandingkan nilai agama lainnya. Hal ini dapat terlihat pada pemicu konflik di tanjung balai karena adanya protes dari warga keturunan Tionghoa Meliana (Budha) yang menegur takmir masjid untuk mengecilkan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun. Kejadian ini secara implisit menegaskan adanya perbedaan nilai yang bermuara kepada konflik, perbedaan yang dimaksud dapat terlihat bahwa pemeluk agama islam mendeskripsikan suara adzan yang keras sebagai nilai ibadah untuk mengabarkan secara luas kepada masyarakat sekitar bahwa waktu solat telah tiba, sedangkan pemeluk agama budha yang direpresentasikan oleh Meliana bahwa nilai tersebut sangat kontras bahkan suara adzan yang keras merupakan sesuatu hal yang mengganggu dan mengusiknya. Oleh karena itu perbedaan nilai antara umat muslim dan umat budha di wilayah tanjung balai selatan mengenai suara adzan akan memunculkan pertentangan atau polarisasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain sehingga terjadilah konflik.

Jika menyoroti aksi kekerasan yang muncul dalam permasalahan konflik antar agama di tanjung balai tidak lagi hanya melibatkan individu, namun sudah melibatkan banyak orang yaitu masyarakat islam yang ada disekitarnya. Perilaku kekerasan yang terjadi di tanjung balai merupakan perilaku kolektif karena tindakan yang dilakukannya secara bersama-sama dengan menyerang ke beberapa tempat peribadatan umat budha yaitu Vihara dan Klenteng. Smelser dalam teorinya menjelaskan mengenai perilaku kolektif yang memiliki 6 tahapan yaitu *structural conduciveness*, *Structural strain*, *Growth and spread of generalized belief*, *Precipitating factors*, *Mobilization of participants for action* dan *The operation of social control*. Jika dikaitkan dengan konflik antar agama di tanjung balai maka deretan tahapan hingga menuju perilaku kolektif dapat terlihat dengan jelas yaitu pertama, **structural conduciveness** atau kesesuaian struktural adalah

situasi sosial yang memungkinkan bahkan mendukung untuk terjadinya perilaku kolektif. Adanya kelompok-kelompok di masyarakat yang memisahkan masyarakat, pemisahan tersebut memunculkan beragam identitas di masyarakat. Dalam masyarakat majemuk perbedaan identitas sangat besar untuk tumbuh di masyarakat, struktur seperti ini sebenarnya dapat saja menunjang atau menghalangi munculnya perilaku kolektif. Berdasarkan pada tahapan pertama maka keadaan sosial yang ada di wilayah kecamatan tanjung balai sudah ada pengelompokan masyarakat terutama dalam hal keyakinan beragama yaitu agama Islam sejumlah 14099 jiwa, agama Kristen sejumlah 1384 jiwa, agama katolik sejumlah 245 jiwa, agama hindu sejumlah 29 jiwa, agama budha sejumlah 8636 jiwa dan agama konghucu sejumlah 7 jiwa. Kondisi ini tentunya secara tidak langsung akan muncul ego bahwa kami penganut agama islam dan kami adalah penganut agama budha. Perbedaan kelompok ini sangat berpotensi memunculkan potensi untuk memunculkan perlawanan-perlawanan apabila adanya kesalahpahaman diantara kelompok tersebut.

Structural strain atau ketegangan struktural merupakan keadaan dimana terdapat salah satu kelompok yang mengalami keadaan yang dirugikan oleh kelompok lain yang kemudian mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa tidak dapat terakomodasi maka situasi tersebut memberikan peluang yang kondusif untuk terjadinya kerusuhan massa. Ketegangan struktural merupakan pencabutan hak dan kekhawatiran akan hilangnya sesuatu merupakan akar penyebab timbulnya perilaku kolektif. Jika dikaitkan dengan konflik di tanjung balai maka kelompok masyarakat pemeluk agama islam sebagai mayoritas tanpa disadari merasa sebagai kelompok yang menentukan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat (dominasi). Walaupun pada kenyataannya nilai-nilai yang

dikembangkan terkadang tidak sejalan dengan apa yang dimiliki oleh kelompok minoritas atau kelompok agama lainnya. Ketegangan yang muncul pada konflik di tanjung balai adalah mengenai Suara adzan yang dipermasalahkan oleh salah satu masyarakat budha atas nama Meliana (41 thn) yang keberatan mengenai suara Adzan dari Mesjid Al-Makshum yang berlokasi didepan rumahnya yang dinilainya lebih keras dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Sdri. Meliana (41 Thn) menyampaikan keberatannya karena Ayah dari Sdri. Ibu Uwo (47 Thn) yaitu Bpk Kasidi adalah Nadzir Mesjid Al-Makshum dengan harapan keberatannya bisa tersampaikan kepada Pengurus Mesjid Al-Makshum. Beberapa hari kemudian, Sdri. Ibu Uwo menyampaikan keberatan dari Sdri. Meliana (41 Thn) kepada adiknya Sdri. Hermayanti (40 Thn) dan adiknya tersebut kemudian meneruskannya kepada Bpk Kasidi. Intinya bahwa suara adzan yang yang menjadi ciri khas masyarakat muslim untuk memanggil ibadah solat dianggap oleh Sdri. Meliana terlalu keras dan menggangu. Oleh karena itu kejadian ini merupakan suatu ketegangan karena adanya perbedaan nilai antara masyarakat muslim dan masyarakat budha, di satu sisi suara adzan bagi masyarakat muslim merupakan sebuah panggilan ibadah dan menjadi suatu kewajiban sedangkan suara adzan bagi masyarakat budha bukan suatu ibadah dan dianggap mengganggu. Penolakan suara adzan oleh masyarakat budha dirasakan sebagai bentuk ancaman atau tidak toleransi terhadap masyarakat muslim yang merupakan masyarakat mayoritas di tanjung balai sehingga kejadian ini menjadi konflik laten yang harus diwaspadai.

Growth and spread of generalized belief atau penyebarluasan kepercayaan merupakan pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar dan cara pencapaian jalan keluar tersebut, pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada situasi

yang menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi perilaku kolektif dengan penyebaran gagasan. Perasaan permusuhan yang disebarkan kepada sesama anggota menjadikan perasaan permusuhan tidak lagi sebagai perasaan individu melainkan perasaan secara kolektif sebagai musuh bersama. Dikaitkan dengan konflik tanjung balai bahwa telah terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas Umat Muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan Agama di Tanjung Balai tentunya penyebaran informasi ini terkait dengan adanya rasa ketidaksukaan beberapa masyarakat muslim mengenai keluhan suara adzan dari meliana. Berdasarkan laporan fakta-fakta dari Komnas HAM bahwa Pada sekitar pukul 20.00 WIB setelah Sholat Isya ternyata jumlah massa disekitar rumah Sdri. Meliana bertambah banyak yang akhirnya diputuskan oleh Kepala Kampung agar permasalahan diselesaikan di Kantor Kelurahan, sehingga Sdri. Meliana dan Suami beserta Pengurus Mesjid Al-Makhsun berkumpul di Kantor Kelurahan. Isu yang beredar disaat itu adalah ada warga etnis Tionghoa (Budha) yang melarang Adzan, mematikan speaker Mesjid, dll, sehingga jumlah massa disekitar rumah Sdri. Meliana (41 Thn) dan juga yang mendatangi Kantor Kelurahan semakin bertambah banyak. Isu-isu tersebut yang membuat masyarakat muslim tanjung balai memiliki perasaan secara kolektif dan menjadikan masyarakat budha sebagai musuh bersama.

Precipitating factors atau faktor-faktor pemercepat yaitu suatu peristiwa atau desas-desus mempercepat munculnya perilaku kolektif. Faktor ini memperkuat secara situasional menggeser konflik latent menjadi konflik actual sebagai suatu peristiwa yang menegaskan kondisi struktural yang rentan konflik, tumbuh kembang suatu ketegangan struktural dan kepercayaan

umum dalam masyarakat dibumbui desas-desus dan informasi yang memanaskan suasana. Jika dikaitkan dengan konflik tanjung balai maka munculnya konflik tersebut dipercepat oleh adanya informasi atau desas-desus yang semakin membuat panas suasana yaitu tulisan di dinding facebook atas nama AHMAD TAUFIK yang menulis informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan menyebutkan “Tanjung Balai Medan Rusuh 30 Juli 2016...!! 6 Vihara dibakar buat Saudara Muslimku mari rapatkan barisan... Kita buat tragedi 98 terulang kembali # Allahu_Akbar...”.

Mobilization of participants for action atau mobilisasi tindakan yaitu para pemimpin memulai, menyarankan dan mengarahkan kegiatan. Peranan figure yang dapat memberikan aba-aba kepada golongannya untuk melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan dan adanya massa yang mudah dihasut dan dikerahkan. Jika dikaitkan dengan kondisi konflik di tanjung balai dapat terlihat Pada sekitar Pukul 23.00-03.00 WIB massa yang terus bertambah dan diperkirakan mencapai 600-1.000 orang melampiasikan kemarahannya dengan melakukan penyerangan, pengrusakan, dan pembakaran terhadap rumah milik Sdr. Meliana (41 Thn) dan rumah ibadah yang berada di Kota Tanjung Balai. Akibatnya ada sekitar 15 (lima belas) bangunan yang mengalami kerusakan dan kebakaran yang terdiri dari Vihara, Klenteng, Bangunan Yayasan, dan rumah Sdri Meliana. Namun besarnya mobilisasi massa diawali dari adanya penyampaian dari bapak kasidi sekitar pukul 19.00 WIB atau setelah Sholat Magrib berjamaah yang menyampaikan keberatan dari Sdri. Meliana (41 Thn) kepada Pengurus DKM Mesjid Al- Makshum yaitu Sdr. Dailami yang disaksikan oleh beberapa Jemaah Mesjid Al- Makshum. Setelah menerima informasi dari Bpk

Kasidi, Sdr. Dailami beserta beberapa Pengurus Mesjid Al-Makshum berkunjung ke rumah Sdri. Meliani (41 Thn) yang berada disebelah Mesjid untuk mengklarifikasi mengenai informasi keberatan suara Adzan. Pada saat klarifikasi terjadi sedikit perdebatan antara Pengurus Mesjid Al-Makshum dengan Sdri. Meliana (41 Thn) yang mengundang keingin tahuan warga yang berada disekitar lokasi. Tentunya kondisi seperti ini justru akan mempengaruhi masyarakat sehingga termobilisasi dan bergabung dengan yang lain sehingga jumlah massa semakin banyak dan bersiap melakukan perilaku kolektif yang mengedepankan kekerasan dan irrasional.

The operation of social control atau pelaksanaan kontrol sosial yaitu semua faktor dipengaruhi oleh para pemimpin, kekuatan polisi, propaganda, perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga eksekutif serta bentuk kontrol sosial lainnya dalam setiap tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial dalam hal ini pemda dan Polri dapat mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku kolektif diatas maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat dihindarkan, namun walaupun kedua stake holder mampu mengidentifikasi tetapi tidak mampu melakukan suatu tindakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya maka akan memberikan kontribusi terjadinya pergeseran terhadap konflik. Tak hanya itu konflik terjadi karena lemahnya kontrol pemerintah atau aparat terhadap media massa dan media sosial serta ragu-ragu dalam penindakan hukum di lapangan. Terkait konflik tanjung balai, aparat kepolisian dinilai masih lambat dalam merespon kejadian konflik tersebut mulai dari deteksi dini hingga keterlambatannya datang ke tempat kejadian perkara ketika penyerangan dan pengrusakan terhadap vihara atau klenteng itu berlangsung, hal ini disampaikan langsung Komnas HAM ketika press release bahwa aparat kepolisian melakukan beberapa kelalaian dalam peristiwa pengrusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai

antara lain : pertama, ketidaksiapsiagaan baik itu Kepolisian Resor Tanjung Balai maupun Kepolisian Resor yang berbatasan dengan Kota Tanjung Balai dalam mengantisipasi kerusuhan massa yang berbau SARA; kedua, penanggung jawab keamanan belum mampu mengorganisir kekuatan internal aparat keamanan dan tidak mampu mengendalikan amuk massa di Kota Tanjung Balai; ketiga, aparat keamanan lamban mengantisipasi amuk massa sehingga menyebabkan rusak dan terbakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi karena kehadiran aparat keamanan ke lokasi rumah ibadah setelah 1 s/d 2 jam pasca perusakan dan pembakaran; keempat, selain itu aparat intelejen yang tidak mampu melakukan deteksi dini dengan baik terhadap konflik tersebut padahal potensi konflik laten itu sudah ada sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah dan rumah milik Sdri. Meliana terjadi. Kondisi aparat kepolisian yang tidak peka terhadap kejadian tanjung balai maka semakin memperburuk konflik yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil yang tidak terhitung jumlahnya.

SOLUSI PEMOLISIAN DALAM KONFLIK KEAGAMAAN DI TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA

Konflik antar agama di tanjung balai sumatera utara menampilkan preseden buruk toleransi antar umat beragama di Indonesia, seharusnya substansi ajaran agama dapat memberikan akhlaqul karimah (ahlak mulia) kepada pemeluknya sehingga dapat menciptakan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar), namun justru disalahgunakan untuk alat pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka guna mencegah konflik tersebut terulang kembali, Lewis Alfred Coser

memberikan solusi dalam penanganan konflik melalui *safety valve* (katup penyelamat) artinya suatu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur atau singkatnya dapat disebut dengan mediator. Dengan adanya katup penyelamat tersebut, kelompok-kelompok yang bertikai dapat mengungkapkan penyebab dari munculnya konflik tersebut dan kemudian diberikan solusi sehingga konflik tersebut dapat diredam bahkan dihilangkan.

Terkait dengan Konflik antar agama di Tanjung Balai perlu mengimplementasikan *safety valve* melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) secara maksimal karena forum ini dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Disinilah peran Polres Tanjung Balai sebagai pilar keamanan di daerah tersebut yang menginisiasi kegiatan dialog melalui FKUB dengan mengundang Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang berkonflik dan beberapa instansi-instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan dialog dimaksud untuk menggali dan menampung aspirasi dari stake holder dan pihak berkonflik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan dibuatkan perjanjian guna mengikat kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak melakukan yang hal serupa.

Sedangkan solusi pemolisian lainnya yang diperuntukkan bagi Polri dalam hal ini Polres Tanjung Balai yaitu **pertama**, perlu peningkatan kinerja dan kepekaan aparat intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap konflik di Tanjung Balai. **Kedua**, meningkatkan peran bhabinkamtibmas yang lebih menekankan pada upaya preemtif dan preventif melalui perpolisian masyarakat, pemolisian berorientasi masalah dan melakukan pembinaan secara intensif

kepada warga Tanjung Balai terutama pihak yang berkonflik dengan menyamakan persepsi akan pentingnya toleransi beragama dan membimbing warga untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat. **Ketiga**, perlu dibuatkan aturan HTCK (hubungan tata cara kerja) antara Polres Tanjung Balai dengan Polres yang ada disekitarnya untuk komitmen bekerjasama dalam kesiapsiagaan menanggulangi konflik antar agama, hal ini dilakukan agar bisa saling memback up jika terjadi kekurangan sumber daya organisasi dalam menghadapi konflik antar agama yang serupa. **Keempat**, membuat perencanaan yang tepat, mengorganisir kekuatan internal yang baik dan pengambilan keputusan yang cepat dari pihak Polres Tanjung Balai yang memungkinkan polisi dapat segera memobilisasi pasukan atau personel ke tempat kejadian konflik sebagai wujud responsifitas Polisi terhadap gangguan keamanan. **Kelima**, perlu dibuat satgas media sosial di Polres Tanjung Balai guna memberikan *counter opinion* terhadap isu/berita provokatif dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan media sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan etika berkomunikasi. Beberapa solusi pemolisian tersebut dapat mengintervensi pada setiap tahapan perilaku kolektif sehingga dapat mencegah dan menanggulangi konflik Tanjung Balai dapat terulang kembali.

KESIMPULAN

Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang religius memberikan ruang terhormat akan keberagaman warga negaranya, bahkan memberikan pengakuan akan adanya perbedaan agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan realitas yang tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, memiliki keanekaragaman Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan, yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagaimana

sombongan “**Bhinneka Tunggal Ika**”. Namun dibalik keanekaragaman tersebut terkadang menimbulkan ketegangan sosial dan merujuk pada terjadinya konflik horizontal karena disebabkan adanya pemaknaan tunggal atas kebenaran, dominasi dan hegemoni terhadap yang lain sehingga sering berimplikasi pada rasa ketidak-adilan dan ketidak-setaraan yang membawa sentimen kelompok yang semakin meluas.

Konflik antar agama di tanjung balai Sumatera Utara menjadi contoh masih rendahnya toleransi beragama dan pemaknaan akan Bhineka Tunggal Ika oleh kelompok yang berkonflik. Kejadian ini harus mendapat perhatian yang serius terutama dari pihak kepolisian guna menganalisa konflik tersebut yang dapat dimulai dari *structural conduciveness* atau kesesuaian struktural, *Structural strain* atau ketegangan struktural, *Growth and spread of generalized belief* atau penyebarluasan kepercayaan, *Precipitating factors* atau faktor-faktor pemercepat, *Mobilization of participants for action* atau mobilisasi tindakan dan *The operation of social control* atau pelaksanaan kontrol sosial. Kemudian pada tahapan tersebut dapat diberi intervensi pemolisian agar konflik tidak terulang kembali dengan cara memanfaatkan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), peningkatan kinerja dan kepekaan aparat intelejen, meningkatkan peran bhabinkamtibmas, pembuatan HTCK (hubungan tata cara kerja) antara Polres tanjung balai dengan Polres yang ada disekitarnya untuk komitmen bekerjasama dalam kesiapsiagaan menanggulangi konflik antar agama, meningkatkan ketanggapsegeraan polisi dalam menanggulangi konflik tanjung balai dengan pengerahan atau mobilisasi personil secara cepat ke tempat kejadian konflik dan membuat satgas media sosial.

Namun sukses tidaknya pemolisian yang dilakukan oleh Polres tanjung balai sangat ditentukan oleh munculnya kesadaran bersama

dari pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah konflik antar agama yang terjadi di tanjung balai Sumatera Utara sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/Dokumen :

Gede, Dewa Juliana. 2014. Penanganan Konflik Penganut Sunni-Syiah Oleh Polri (Studi Kasus Di Kabupaten Sampang Jawa Timur). Tesis Magister Ilmu Kepolisian : Jakarta.

Irwansyah. 2013 Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim-Buddhis (Kasus Konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara). Jurnal Analisa Volume 20 hal 155-168

Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi. 2014. Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia. Pusad Paramadina : Jakarta.

Sidel, John T. 2007. *Riots, Pogroms, and Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: NUS Press.

Soetomo. 1995. Masalah Sosial dan pembangunan. Pustaka jaya : Jakarta.

Sutrisno, 2017. Materi Kuliah Konflik dan Resolusi. STIK-PTIK : Jakarta.

Dokumen Keterangan Pers Komnas Ham. Nomor : 026/Humas-KH/VIII/2016 Tentang Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. <https://www.komnasham.go.id/files/20160811-keterangan-pers-peristiwa-penyerangan-8M.pdf>.

Dokumen Press Release Polres Tanjung Balai tahun 2016 mengenai Tindak pidana penghasutan melalui akun Facebook yang dapat

menimbulkan ancaman terkait suku, agama, ras dan golongan (SARA) oleh Ahmad Taufik.

Sumber Internet :

<https://coracoret.wordpress.com/2013/07/09/pluralitas-dan-konflik-antar-agama-di-indonesia/>

<http://www.nu.or.id/post/read/75785/yenny-wahid-tahun-2016-kasus-kekerasan-beragama-meningkat>

<http://www.nu.or.id/post/read/75785/yenny-wahid-tahun-2016-kasus-kekerasan-beragama-meningkat>

<http://news.detik.com/berita/3264873/ini-data-10-rumah-ibadah-yang-dibakar-saat-bentrok-warga-di-tanjung-balai>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160730133733-20-148088/warga-sepakat-hentikan-kekerasan-di-tanjungbalai/>

<http://merahputih.com/post/read/dipicu-suara-azan-konflik-sara-di-tanjung-balai-pecah-ini-kronologinya>

<http://madina.or.id/terganggu-dengar-suara-adzan-picu-kerusakan-berbau-sara-tanjungbalai/>

<http://simantabs-tanjungbalaiselatan.com/jumlah-penduduk-menurut-agama/>

<https://brivitegal.wordpress.com/2008/09/24/tugas-fungsi-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub/>